

**PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT BERBASIS POTENSI LOKAL PADA  
KECAMATAN BUKIT KERMAN  
(Studi Kasus Pada Masyarakat desa Pulau Pandan)**

**Mas Toha<sup>1</sup>,  
Eliyusnadi,S.Kom.,M.Si<sup>2</sup>, Drs, Amir Hasan, MM<sup>3</sup>  
Stia Nusa Sungai Penuh**

Email

[mastoha73@gmail.com](mailto:mastoha73@gmail.com)

[eliyusnadi@gmail.com](mailto:eliyusnadi@gmail.com)

[amirhasan@gmail.com](mailto:amirhasan@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Pulau Pandan Village, Bukit Kerman District, Kerinci Regency is the location of the author's exploration and field service which is geographically located at an altitude of approximately 150 masl, precisely on the edge of Lake Kerinci. Lake Kerinci has various natural and cultural tourism objects which are also supported by the richness of local customs and culture which synergize with local wisdom of fishermen, vegetable farmers and agriculture which are the livelihoods of the majority of the community. It is an efficient and effective step to make the Pandanini Island village a Tourism Village. The purpose of this study was to analyze the development of tourism villages and community empowerment based on local potentials on Pandan Island. The approach used in this research is a qualitative approach, the results of the research. Development of a tourist village-based tourism village will of course have an impact either positive or negative. A tourist spot certainly has impacts on the surrounding environment. The community in the environment of a village is very important in the life of a tourist object, which is very important in the life of a tourist object because they have a culture that can become a tourist attraction, community support for tourist attractions in the form of basic necessities for tourist attractions, adequate labor where the parties managers of tourist objects need it to support the sustainability of the object's life and satisfy people who need work which makes people's lives better.*

*Key words: village, tourism and local potential development*

**ABSTRAK**

Desa Pulau pandan Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci merupakan lokasi eksplorasi dan bakti lapangan penulis yang secara geografis berada pada ketinggian kurang lebih 150 Mdpl tepatnya berada di Pinggiran Danau Kerinci. Danau Kerinci ini memiliki berbagai objek wisata alam dan budaya dimana didalamnya ditopang pula dengan kekayaan adat serta budaya kultural setempat yang bersinergi dengan kearifan lokal Para Nelayan, Petani sayur serta pertanian yang merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakatnya. Merupakan langkah yang efisien dan efektif dimana menjadikan desa Pulau pandanini menjadi Desa Wisata. Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis Pengembangan Desa Wisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Pulau Pandan . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, hasil penelitian Pengembangan desa wisata berbasis desa wisata tentu saja akan

memberikan dampak baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Suatu tempat wisata tentu memiliki dampak-dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Masyarakat dalam lingkungan suatu desa sangatlah penting dalam kehidupan suatu objek wisata sangatlah penting dalam kehidupan suatu objek wisata karena mereka memiliki kultur yang dapat menjadi daya tarik wisata, dukungan masyarakat terhadap tempat wisata berupa sarana kebutuhan pokok untuk tempat objek wisata, tenaga kerja yang memadai dimana pihak pengelola objek wisata memerlukannya untuk menunjang keberlangsungan hidup objek dan memuaskan masyarakat yang memerlukan pekerjaan dimana membuat kehidupan masyarakat semakin membaik.

Kata kunci: *Desa, wisata dan pengembangan potensi lokal*

## I. PENDAHULUAN

Beberapa orang yang memiliki ideologi sama dan tinggal di suatu daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama dalam membela negara dapat disebut sebagai rakyat. Rakyat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari suatu negara atau suatu pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, rakyat memiliki kewajiban memperjuangkan serta membela negaranya dan ikut aktif dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dari kewajiban tersebut negara memiliki kewajiban yang sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh rakyat, di antaranya memberikan penghidupan yang layak kepada rakyat, memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan (Pasal 27 dan 32, bab XIV, UUD 1945).

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban negara kepada rakyat maka ditetapkanlah Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta peraturan lain yang bersifat mengikat dengan berkiblat kepada batang tubuh negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Salah satu langkah komprehensif yang dilakukan oleh Negara dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata kepada masyarakat Indonesia tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (merupakan revisi dari UU No. 32 Tahun 2004 yang didasarkan pada Tap. MPR RI No. IV/MPR/2000; Tap. MPR RI No. XV/MPR/1998; UUD RI 1945 Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2). Dalam UU 23 tahun 2014 terangkum hak-hak khusus yang diberikan oleh negara baik itu bersifat Desentralisasi, Dekonsentrasi maupun tugas pembantuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan rumah tangga daerah terkait yang mengedepankan unsur kemandirian.

Salah satu butir penting yang perlu digarisbawahi dalam kaitannya Otonomi Daerah seperti yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tersebut berkaitan tentang keadilan sosial, pemerataan wilayah daerah dan mendorong pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan prakarsa dan kreativitas dalam kaitan peran serta masyarakat untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dalam butir tersebut maka kita harus menilik lebih dalam mengenai unsur pemerintahan daerah di sektor akar rumput, karena unsur inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan seharusnya pada level ini pemerintah dapat memetakan secara lebih faktual kelemahan maupun keunggulan yang dapat dikembangkan atau diberdayakan dalam kaitan pemenuhan harkat hidup kesejahteraan masyarakat yang merupakan cita-cita bersama. Sektor akar rumput yang patut disoroti disini tidak lain tidak bukan yaitu unsur Desa/Kelurahan.

Dalam implementasi UU No.23 tahun 2014 belum mencakup secara spesifik mengenai pengaturan Desa/Kelurahan, maka peraturan tersebut dijabarkan kembali dengan lebih spesifik dalam UU No. 6 tahun 2014 yang didalamnya pada pasal 18 dimana desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan begitu banyaknya tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang diemban atau dimiliki oleh desa maka perlu jalan keluar terbaik dengan langkah strategis yang lebih optimal dalam menggenjot pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan sehingga diharapkan tujuan kemakmuran bersama dapat diperoleh secara lebih komprehensif.

Langkah strategis yang digagas oleh daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitan pengembangan dan pemberian rangsangan positif bagi masyarakat untuk mau dan mampu berdikari yaitu memberikan fokus secara lebih faktual dengan mempertimbangkan SDM, SDA dan aspek kultural yang melekat pada wilayah tertentu menjadi suatu bentuk unggulan dalam mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat, sebagai contoh dibentuknya Kampung nelayan, Desa mandiri, Desa Wisata dan lain-lain.

Desa Pulau Pandan Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci merupakan lokasi eksplorasi dan bakti lapangan penulis yang secara geografis berada pada ketinggian kurang lebih 150 Mdpl tepatnya berada di Pinggiran Danau Kerinci. Danau Kerinci ini memiliki berbagai objek wisata alam dan budaya dimana didalamnya ditopang pula dengan kekayaan adat serta budaya kultural setempat yang bersinergi dengan kearifan lokal Para Nelayan, Petani sayur serta pertanian yang merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakatnya. Merupakan langkah yang efisien dan efektif dimana menjadikan desa Pulau Pandan ini menjadi Desa Wisata.

Mengaitkan antara peraturan perundang-undangan yang ada baik dalam kaitan otonomi daerah maupun otonomi desa yang pada saat ini di galakkan oleh pemerintah salah satunya melalui Nawa Cita Jokowi-JK khususnya Nawa Cita ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa” maka perlu adanya rumusan secara terstruktur dan terarah serta adanya pendampingan secara komprehensif dalam pelaksanaan atau realisasinya agar tidak terjadi sistem pembangunan yang saling tumpang tindih dimana dikhawatirkan akan merusak tatanan kultural yang sudah ada di dalam lingkungan terkait.

Berdasarkan pengamatan awal penulis dan wawancara ringan dengan masyarakat setempat di lokasi penelitian terkait pengembangan desa wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal antara lain:

- 1) Belum adanya program kerja desa wisata kemudian dari pada itu fasilitas di desa juga masih sangat kurang apalagi sumber daya manusia masih sangat kurang melihat minimnya masyarakat yang mengerti tentang namanya pariwisata
- 2) Kurangnya partisipasi *stakeholder* dalam pengembangan potensi lokal desa. *Stakeholder* dibagi lagi menjadi 3 yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Partisipasi dari pemerintah merupakan pihak yang mencetuskan adanya desa wisata dalam kewenangan yang ada di suatu daerah. Dalam kenyataannya dalam pengembangan desa wisata yang sudah ditetapkan menjadi desa wisata tetapi untuk program-program di desa wisatanya belum ada, selanjutnya dari pelaku usaha (swasta) terlihat pada desa wisata masih minimnya pelaku usaha dikarenakan sumber daya manusia sangat terbatas dan untuk pengetahuan pariwisata juga sangat kurang, belum adanya daya tarik lokal yang sifatnya diadakan setiap hari dan faktor pendukung berupa fasilitas masih sangat minim serta promosi. Dan yang terakhir masyarakat belum berpartisipasi sepenuhnya dalam melakukan perencanaan, pengembangan dan pengawasan karena masih terbatasnya pengalaman dan keahlian khusus yang dimiliki.
- 3) Sinergisitas antara *stakeholder*. Partisipasi *stakeholder* merupakan peranan penting untuk mengembangkan desa wisata berbasis potensi lokal, dalam hal ini harus adanya sinergisitas antara berbagai aspek yaitu: pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

Dari temuan di lapangan untuk melihat sebuah sinergisitas atau hubungan antara stakeholder dalam pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal belum adanya sebuah program kerja yang kongkrit banyak yang masih meraba-raba atau kurang pahami masyarakat tentang pariwisata, pengembangan potensi lokal yang dikembangkan (baik keahlian, seni tari, seni ukir dan kegiatan-kegiatan bersifat lokal), serta pihak swasta yang masih enggan untuk melakukan usaha.

sangat minim karena kurangnya sosialisasi atau pelatihan pariwisata khususnya desa wisata Munggu sehingga, partisipasi masyarakat sangat minim, mereka lebih mementingkan urusan pekerjaannya sebagai nelayan, petani di sawah dan melakukan kegiatan yang mendapatkan upah dan hasil. Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis Pengembangan Desa Wisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Pulau Pandan

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Moelong (2002:2) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Lebih lanjut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif berupa informasi teks, catatan, dan laporan pendapat partisipan. (Emzir, 2007:26).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memaparkan dengan rinci masalah yang diteliti. (Andriani, Duri 2011:3.5).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai, Pengembangan Desa Wisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal, diharapkan dengan penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana implementasi, permasalahan yang dihadapi, serta bagaimana solusinya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan desa wisata berbasis desa wisata tentu saja akan memberikan dampak baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Suatu tempat wisata tentu memiliki dampak-dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Masyarakat dalam lingkungan suatu desa sangatlah penting dalam kehidupan suatu objek wisata sangatlah penting dalam kehidupan suatu objek wisata karena mereka memiliki kultur yang dapat menjadi daya tarik wisata, dukungan masyarakat terhadap tempat wisata berupa sarana kebutuhan pokok untuk tempat objek wisata, tenaga kerja yang memadai dimana pihak pengelola objek wisata memerlukannya untuk menunjang keberlangsungan hidup objek dan memmuaskan masyarakat yang memerlukan pekerjaan dimana membuat kehidupan masyarakat semakin membaik.

Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata, karena penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut.

### 1.1. Tahap Persiapan

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Ada berbagai macam desa wisata, yakni bisa berupa desa wisata berbasis keindahan alam, kuliner maupun budaya. Memang, dalam

membangun dan mengembangkan desa wisata bukan perkara mudah. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan informan, informan menjelaskan bahwa:

Tahap pertama yang harus dilakukan dalam pembangunan desa wisata adalah pemetaan dan identifikasi potensi wisata. Yakni sebuah langkah untuk mengenali dan mengidentifikasi potensi wisata di suatu desa. Potensi tersebut bisa berupa potensi alam, kuliner maupun seni dan kebudayaan. (wawancara dengan bapak arafik, dilakukan pada tanggal 8 september 2020)

Informan memberikan informasi tambahan bahwa:

apabila identifikasi potensi wisata di suatu desa sudah dilakukan. Maka, langkah kedua adalah melakukan studi banding ke desa lain yang memiliki potensi wisata yang sama. Apabila potensi wisata yang teridentifikasi berupa potensi wisata alam, maka studi banding bisa dilakukan di Desa dalam kabupaten kerinci dan kota sungai penuh bahkan keluar daerah. (wawancara dengan bapak arafik, dilakukan pada tanggal 8 september 2020)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan informan kedua, informan menjelaskan bahwa:

Langkah selanjutnya dilakukan adalah melakukan kajian dampak pariwisata. Dalam kajian dampak pariwisata tersebut yang perlu dipahami adalah setiap potensi wisata memiliki dampak pariwisata masing-masing, artinya tak semua desa wisata memiliki kesamaan dampak pariwisata. (wawancara dengan bapak radial warga desa pulau pandan, wawancara dilakukan pada tanggal 9 september 2020)

Informan menambahkan bahwa menambahkan bahwa:

Apabila potensi wisatanya berupa alam, maka dampak yang harus dipikirkan adalah terkait urusan pelestarian alam. Kita ambil contoh, potensi wisatanya berupa goa, maka yang harus dikaji adalah bagaimana menjaga goa tersebut tetap aman digunakan untuk kegiatan pariwisata. (wawancara dengan bapak prantono, warga desa pulau pandan. wawancara dilakukan pada tanggal 9 september 2020)

Pada kesempatan yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan informan ketiga, informan menjelaskan bahwa:

Sangat betul apa yang disampaikan oleh bapak prantono, saya perlu menambahkan bahwa apabila langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya



adalah urusan regulasi. Dalam hal ini, pengurus desa wisata harus memperhatikan aturan main. Apabila potensi wisatanya berupa alam seperti yang disampaikan oleh bapak lesdianto tadi, maka hal mendasarkan yang harus dilakukan adalah memastikan status tanah. Hal ini agar tidak terjadi klaim ataupun kekisruhan di masa mendatang. . (wawancara dengan bapak efendi warga pulau pandan, wawancara dilakukan pada tanggal 9 september 2020)

Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tahap persiapan desa wisata dalam pengembangan potensi lokal pada suatu daerah adalah selalu dilakukan dalam pembangunan desa wisata adalah pemetaan dan identifikasi potensi wisata, melakukan studi banding ke desa lain yang memiliki potensi wisata yang sama. Apabila potensi wisata yang teridentifikasi berupa potensi wisata alam, maka studi banding bisa dilakukan di Desa dalam kabupaten kerinci dan kota sungai penuh bahkan keluar daerah dan melakukan regulasi.

## 1.2. Tahap Pengkajian

Desa wisata merupakan salah satu bentuk Wisata Pedesaan. Wisata pedesaan merupakan perjalanan yang berorientasi menikmati suasana kehidupan pedesaan, menghormati serta memperoleh nilai tambah hidup dari budaya dan tradisi masyarakat setempat serta lingkungan alam, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dan lingkungannya merupakan obyek dan daya tarik wisata. Lingkup desa wisata dapat berupa alam seperti gunung, persawahan, hutan, tebing, bentang alam, flora dan fauna, juga taman laut; budaya seperti peninggalan sejarah, adat istiadat, tradisi, kehidupan sehari-hari, dan karya arsitektur; atau berupa *saujana*, yaitu karya budaya (benda) yang ‘menyatu’ dengan bentang alam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa:

Seringkali pihak pemerintah daerah kabupaten atau kota, dalam hal ini Dinas Pariwisata, mengalami kebingungan dalam melakukan seleksi terhadap puluhan calon desa wisata yang ada di wilayahnya. (Wawancara dengan bapak edi sami warga desa puau pandan dilakukan pada tanggal 10 september 2020)

Pernyataan yang disampaikan oleh informan, dikuatkan lagi oleh pernyataan tambahan disampaikan oleh informan berikutnya, informan menjelaskan bahwa:

Sangat sulit mencari tolok ukur dalam meloloskan atau menolak sebuah desa untuk ditetapkan sebagai desa wisata. Pihak aparat dalam hal ini di Dinas Pariwisata Kabupaten kerinci seringkali gamang (dilematis) bila dihadapkan pada sejumlah pertanyaan mendasar soal kriteria apakah yang dipergunakan dalam menyeleksi calon-calon desa wisata tersebut. (wawancara dilakukan dengan bapak pikaldi warga pulau pandan pada tanggal 10 september 2020)

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya, informan memberikan jawaban bahwa:

Penyusunan criteria desa wisata ini adalah dalam upaya menjawab kegamangan pihak Dinas Pariwisata tersebut, yang mungkin juga menjadi kegelisahan para pemangku kepentingan desa wisata yang lainnya. (wawancara dengan kepala dinas pariwisata kabupeten kerinci pada tanggal 17 september 2020).

Selanjutnya Informan menjelaskan bahwa:

Kriteria desa wisata sebagai instrument untuk melakukan verifikasi desa wisata yang dihasilkan dalam penelitian ini terdiri dari delapan aspek, antara lain; aspek alam, lingkungan fisik, budaya, aspek amenitas/prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), aspek kelembagaan, sikap dan tata kehidupan masyarakat, dan aspek aksesibilitas. Ke delapan aspek memiliki jumlah kriteria yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat urgensi masing-masing aspek. Sedangkan, masing-masing kriteria memiliki skor maksimal yang berbeda sesuai dengan bobotnya masing-masing. ( wawancara dengan ibu juanda sasmita kadis pariwisata kebudayaan dan pariwisata kabupaten kerinci pada tanggal 13 september 2020)

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pengkajian untuk menjadikan sebuah desa menjadi desa wisata sangat sulit dijadikan tolok ukurnya karena banyak sekali kegambangan dari stake holder terkait dalam melakukan verifikasi pengkajian untuk menjadikan desa sebagai destinasi wisata.

### **1.3. Tahap Perencanaan**

Model pengembangan desa wisata dianggap menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Program pengembangan desa wisata juga dianggap berhasil untuk menekan urbanisasi (perpindahan) orang desa ke kota. Ke depan, kami pun melihat bahwa pengembangan desa wisata akan menjadi tren dalam pembangunan wilayah. Tren ini merupakan respon terhadap motivasi baru dalam berwisata, terutama masyarakat Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan. Informan menjelaskan bahwa:

Adanya pengembangan desa wisata di suatu wilayah, diharapkan agar tumbuh klaster desa-desa yang menjadi basis pokok berbagai kebutuhan desa wisata yang bersangkutan. Misalnya, Desa A memasok produk pendukung seperti kerajinan dan kesenian lokal untuk Desa Wisata B. (wawancara dengan bapak Usman Arifin kepala UPTD di lakukan pada tanggal 15 september 2020)

selanjutnya jawaban dari informan, di tambahkan lagi dengan jawaban berikutnya. Informan menjelaskan bahwa:

Dalam proses merintis desa wisata, masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumberdaya, keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan di desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang berhubungan. Namun pada kenyataannya, sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat sehingga mereka hanya menjadi objek (penonton) dalam pembangunan saja. (wawancara dengan bapak refdi kasi dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kerinci, di wawancara pada tanggal 15 September 2020)

Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal nantinya akan berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan, mulai dari perencanaan, pengawasan, dan implementasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan. Informan menjelaskan bahwa:

Perencanaan dalam desa wisata harus ada Model pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata atau lebih familier dikenal dengan konsep *Community Based Tourism* sampai saat ini masih hangat untuk diperbincangkan dalam rangka pembangunan pariwisata suatu wilayah. Model pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata ini pernah diwujudkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (wawancara dengan bapak rino antoni kasi musium dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kerinci wawancara dilakukan pada tanggal 15 september 2020).

Jawaban dari Informan di tambahkan lagi dengan jawaban informan selanjutnya yang menjelaskan bahwa:

*Community Based Tourism* merupakan sebuah konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal di mana masyarakat turut andil dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian pendapat. (Wawancara dengan ibu juanda sasmita kepala dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kerinci pada tanggal 17 september 2020)

Melalui penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep perencanaan dalam pengembangan pengembangan destinasi desa wisata berkelanjutan yang turut melibatkan masyarakat lokal dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, hingga penerima manfaat dari pembangunan. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan telah menjadi agenda global setiap negara. Oleh karena itu, setiap dari kita yang akan dan terlibat dalam pengembangan destinasi wisata haruslah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### 1.4. Tahap Pelaksanaan

Sebelum akhirnya desa bisa dikatakan sebagai desa wisata, terdapat 4 tahap perkembangan desa wisata. Ke 3 tahapan tersebut umumnya dicapai dalam jangka waktu tertentu yang direncanakan selama pembentukan desa wisata. Pembentukan tersebut seperti dimulai dari perencanaan jangka pendek hingga perencanaan jangka panjang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, informan menjelaskan bahwa:

Tahap perkembangan desa wisata yang adalah Desa yang dilihat dari Berpotensi yang ada . desa harus mengenali potensi apa yang ada didalamnya. Potensi tersebut kemudian disesuaikan pada prinsip-prinsip pengembangan desa wisata seperti pada sumber daya alam, kearifan lokal, hingga sumber daya manusianya. (wawancara dengan bapak usman arifin kepala UPTD. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 september 2020)

Selanjutnya informan menjelaskan lagi bahwa:

tahap perkembangan desa wisata di tahap Desa Berpotensi adalah warga desa yang belum memahami potensi desanya, ketiadaan fasilitas hingga kunjungan ke desa



yang masih sedikit serta belum diolahnya kunjungan wisatawan sebagai mata pencahariaan bagi penduduk. Setelah memahami potensi yang ada di dalam desa, kemudian ditentukanlah apakah desa tersebut layak menjadi desa yang bisa dikembangkan ke arah wisata atau tidak. Karena, tidak semua desa mampu mencapai atau menjadi tahap perkembangan desa wisata sebagai Desa Berpotensi untuk desa wisata. . (wawancara dengan bapak usman arifin kepala UPTD. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 september 2020)

Selanjutnya informan melakukan wawancara dengan informan. Informan menuuuturkan bahwa:

Salah satu tren perkembangan pariwisata dalam beberapa tahun belakangan adalah perkembangan model pariwisata berbasis desa wisata. Kemunculan desa wisata mulai marak di berbagai daerah . Hal tersebut diikuti juga dengan munculnya ide-ide kreatif dalam upaya pengembangan desa wisata agar terkesan unik dan berbeda dengan wisata lainnya. (wawancara dengan bapak refdi kasi dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kerinci, wawancara di lakukan pada tanggal 15 september 2020)

Berikutnya pada kesempatan yang sama, informan selanjutnya menjelaskan bahwa :

Pelaksanaan perkembangan desa wisata sangat dibutuhkan sekali kesadaran masyarakat pada suatu desa sudah tumbuh bahwa wisata yang ada dalam desa bisa menjadi sumber penghidupan mereka dan yang kedua adalah bahwa desa tersebut sudah dikenal oleh para wisatawan lokal kerinci hingga wisatawan asing baik itu dari luar kabupaten kerinci bahkan mancanegara dan tidak sedikit pula yang datang berkunjung. Dari bangunan fisik pun, untuk tahap perkembangan desa wisata akhir sudah dianggap memiliki fasilitas yang lengkap. Sedangkan jika ada proses pembangunan, mungkin diarahkan ke pengembangan karena fasilitas sudah cukup atau terbilang sudah terpenuhi. (Wawancara dengan ibu juanda sasmita kepala dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kerinci pada tanggal 17 september 2020)

Dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan desa pariwisata sangat dibutuhkan sekali dari potensi yang ada pada desa dan juga kesadaran dari warga masyarakat untuk menjaga kondisi lingkungan dan juga menjaga fasilitas yang terdapat pada desa wisata tersebut sehingga mencapai tujuanyang diharapkan. Dalam upaya Pelaksanaan desa wisata sangat diperlukan sekali program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.

### **1.5. Tahap Evaluasi**

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan

melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa:

Keberadaan desa wisata dinamikanya dipengaruhi pengelola desa wisata. Ada beberapa indikator desa wisata yang di evaluasi oleh dinas kebudayaan dan pariwisata diantaranya potensi atraksi, kapasitas manajerial, peran serta masyarakat, tersedia sarana dan prasarana, aspek promosi, aksesibilitas jalan, kunjungan wisatawan, dan kepemilikan asset. Jika melihat potensi yang ada pada desa pulau pandan maka potensi wisata yang layak dikembangkan di desa tersebut menurut saya adalah arus jeram. Potensi arus jeram ini kan pernah dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka festival danau kerinci. Untuk kedepannya bisa dibuat berkelanjutan dan dioptimal lagi potensi yang ada, sehingga potensi ini dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat desa setempat. (Wawancara dengan ibu juanda sasmita kepala dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kerinci pada tanggal 17 september 2020)

selanjutnya informan memberikan penjelasan tambahan bahwa:

monitoring dan evaluasi merupakan hal yang wajib dilakukan, termasuk dalam manajemen desa wisata. Sebuah desa wisata yang sedang melakukan upaya pengembangan perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah bagian dari pengupayaan program tersebut. Objek-objek yang dapat diamati dari monitoring dan evaluasi di desa wisata seperti atraksi wisata, akomodasi, transportasi, wisatawan, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan desa wisata tersebut. ((Wawancara dengan ibu juanda sasmita kepala dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kerinci pada tanggal 17 september 2020)

Dapat di tarik kesimpulan bahwa evaluasi sangat perlu sekali dalam membentuk desa wisata karena dengan adanya evaluasi yang dilakukan dengan memakai indikator untuk mengetahui sejauh mana perkembangan serta perubahan objek atau program tersebut, apakah sudah mencapai *goal*/ tujuannya atau belum.

#### IV. KESIMPULAN

Tahap persiapan desa wisata dalam pengembangan potensi lokal pada suatu daerah adalah selalu dilakukan dalam pembangunan desa wisata adalah pemetaan dan identifikasi potensi wisata, melakukan studi banding ke desa lain yang memiliki potensi wisata yang sama. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*, dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. proses pengkajian untuk menjadikan sebuah desa menjadi desa wisata sangat sulit dijadikan tolok ukurnya karena banyak sekali kegambangan dari stake holder terkait dalam melakukan verifikasi pengkajian untuk menjadikan desa sebagai destinasi wisata.

Konsep perencanaan dalam pengembangan pengembangan destinasi desa wisata berkelanjutan yang turut melibatkan masyarakat lokal dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, hingga penerima manfaat dari pembangunan. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan telah menjadi agenda global

setiap negara. Oleh karena itu, setiap dari kita yang akan dan terlibat dalam pengembangan destinasi wisata haruslah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan desa wisata sangat diperlukan sekali program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.

evaluasi sangat perlu sekali dalam membentuk desa wisata karena dengan adanya evaluasi yang dilakukan dengan memakai indikator untuk mengetahui sejauh mana perkembangan serta perubahan objek atau program tersebut, apakah sudah mencapai *goal*/ tujuannya atau belum.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih saya ucapkan kepada dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam penyusunan Skripsi ini serta dosen Penguji yang telah memberi masukan guna untuk memperbaiki Skripsi Tersebut, serta terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya dan semangatnya supaya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta teruntuk some one special in my life, big thanks to your help i know you send by Allah for me the best

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H. Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi V. Jakarta: Reneka Cipta.
- Arida nyoman, dkk. 2017. “Kajian penyusunan kriteria-kriteria desa wisata sebagai instrumen dasar pengembangan desa wisata”. *Jurnal analisis pariwisata*. Vol.17. No 1, 2017. ISSN 1410-3729
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2015). *Petunjuk Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Bahri, Sitti Maryam. (2017). *Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Maksasar: Universitas Hasanuddin.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto, totok. 2014. CSR (corporate social responsibility)( tanggung jawab sosial korporasi). Bandung : alfabeta.
- Maukemana viki, 2019. *Desa wisata (tahapan dan pengembanggan)*. Bandung : alfabeta.
- Yudha veryi, 2019. *Membangun Desa wisata*. Bandung : alfabeta.
- Najiati, sri, dkk. 2005. Pemberdayaan masyarakat lokal di lahan gambut. Bogor: wetlands internasional
- Nasikun. (1997). *Model Pariwisata Pedesaan: Pemodelan Pariwisata Pedesaan untuk Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan*. dalam *Prosiding Pelatihan dan*

- Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.*
- Suharto, edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: refika aditama
- Soerjono Soekanto. (1987) *Sosial Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali press,  
tersedia di <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-> diakses tanggal 7 Mei 2020
- Putri. 2018. Skripsi. “*Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*”. Jurusan administrasi publik. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. universitas diponegoro.